

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982)
- Adrian Sutedi, *Sertifikat hak atas tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Prenada Media, 2019)
- Ahmadi Miru, *Hukum kontrak dan perancangan kontrak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- Budi Santoso, *Profit Berlipat dengan Investasi tanah dan Rumah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013)
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005)
- Lilik Nur S, *Mengenal Tanaman Makanan Pokok*, (Semarang: Alprin, 2020)
- Moh. Nazir, *Metode penelitian*, (Cet. 6. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020)
- Muhajir Utomo, *Ilmu Tanah Dasar-dasar dan Pengelolaan*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Munir Fuady, *Perbuatan melawan hukum: pendekatan kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Salim H. S, *Hukum kontrak: teori dan teknik penyusunan kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: : Intermasa, 2020)
- Sudikno Mertokusumo, dan W. Riawan Tjandra, *Perbuatan melawan hukum oleh pemerintah*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- Supeno, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan: Hukum Perjanjian Pada Umumnya, Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Internasional, dan Perjanjian Dalam Perpektif Hukum Islam*, (Jambi: PT Salim Media Indonesia, 2023)
- Urip Santoso, *Hukum agraria: kajian komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- _____, *Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Jurnal

- Danang Wirahutama, “Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tandatangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik.”, *Masalah-Masalah Hukum* Vol 47, no. 2, April 2018: 118. DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.118-127>.
- David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 8, no. 8, (2021).
- Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.”, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 8, no. 1, November 2015. DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

- Elisa Debora Waani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Yang Di Keluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang (Badan Pertanahan Nasional).”, *Lex Crimen* Vol. II, no. 2, (2017): 8.
- Ery Agus Priyono, “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak).”, *Diponegoro Private Law Review* Vol 1, no. 1 (2017). DOI: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1934>.
- Lilik Tahmidaten dan Wawan Krismanto. “Permasalahan Budaya Membaca Di Indonesia (Studi Pustaka Tentang Problematika & Solusinya).”, *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* Vol 10, no. 1, Januari 2020: 22–33. DOI: <https://doi.org/10.24246/j.js.2020.v10.i1.p22-33>.
- Mahfiana, Layyin. “SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PONOROGO.”, *Kodifikasia* Vol. 7, no. 1, Agustus 2013. DOI: <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v7i1.215>.
- Putu Diva Sukmawati, “Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia.”, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* Vol 2, no. 2, Februari 2022: 89–102. DOI: <https://doi.org/10.23887/jih.v2i2.1015>.
- Rahman, Irsan, Riezka Eka Mayasari, Yeni Haerani, dan Patma Sari. “Analisis Hukum Perdata Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah.”, *Jurnal Tana Mana* Vol 3, no. 1, April 2022: 77–85. DOI: <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i1.341>.
- Velliana Tanaya, Catherine Susantio, dan Cassey Regina Salamintargo. “Land Grabbing As Unlawful Act.”, *Law Review* Vol XXII, no. 1, Juli 2022: 078. DOI: <https://doi.org/10.19166/r.v0i1.5100>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630)

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Kawasan Dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor: 3/Pdt.G/2020/PN Kfm
Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 80/Pdt/2020/PT Kpg

Website

Artikel DJKN, *Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html> pada tanggal 7 Oktober 2023.

Badan Pusat Statistik, “Data dan Informasi Kepadatan Penduduk menurut Provinsi (jiwa/km²) Tahun 2019-2021”. <https://www.bps.go.id/indikator/12/141/1/kepadatan-penduduk-menurut-provinsi.html>, Diakses pada tanggal 25 Agustus 2023

_____, “Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2019”. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/U_FpWMmJZOVZIZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da_01/2, Diakses pada tanggal 5 September 2023

_____, “Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2021”. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/U_FpWMmJZOVZIZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da_01/1, Diakses pada tanggal 5 September 2023

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, “Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (Ribuan Jiwa), 2018-2022”. <https://sulut.bps.go.id/indikator/12/958/2/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-di-indonesia.html>, Diakses pada tanggal 5 September 2023

Black’s Law Dictionary, diakses dari <https://thelawdictionary.org/tort/> pada tanggal 2 Oktober 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/konsensual>, pada tanggal 11 Oktober 2023

_____, diakses dari <https://kbbi.web.id/perjanjian> pada tanggal 9 September 2023

_____, diakses dari <https://kbbi.web.id/serobot> pada 2 Oktober 2023

_____ , diakses dari <https://kbbi.web.id/tanah> pada tanggal 1 September 2023.

Kompas.id, “Hampir Separuh Wilayah Jakarta Berupa Permukiman Kumuh”. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/05/27/hampir-separuh-wilayah-jakarta-berupa-permukiman-kumuh>, Diakses pada tanggal 5 September 2023

Legal Information Insititute, Cornell Law School diakses dari <https://www.law.cornell.edu/wex/trespass> pada 7 Oktober 2023

